

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ungkapan ‘Pemberdayaan masyarakat’ sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat banyaknya proyek pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh sektor komersial, kelompok sosial atau masyarakat, BUMN, dan pemerintah, kami paham betul dengan konsep ini. Surat kabar, radio, televisi, dan internet adalah tempat umum kita mendengar acara-acara ini. Mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat merupakan tujuan utama dari program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal.(Alhada & Habib, 2021).

Dari sudut pandang teoritis, pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai upaya terorganisir oleh sekelompok orang yang bersatu untuk mengatasi permasalahan sosial atau menyediakan kebutuhan dasar dengan cara yang sesuai dengan kekuatan dan sumber daya mereka sendiri (Sumodiningrat, 2009). Salah satu alternatif definisi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai paradigma pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan nilai sosial. Pembangunan berkelanjutan, berpusat pada masyarakat, partisipatif, dan memberdayakan adalah paradigma baru yang diwujudkan dalam gagasan ini (Alhada & Habib, 2021).

Dalam sebagian besar kasus, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat anggota masyarakat yang lebih lemah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mendasar mereka dengan lebih baik setelah mereka menjadi pelaku usaha. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan merupakan hal yang sangat penting. Diharapkan bahwa masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut, selain dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan berkualitas tinggi ketika mereka membutuhkannya, dan terhadap sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam hal ini masyarakat diharapkan kan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi pelaku usaha (Edi Suharto, 2014).

Agar pemberdayaan dapat berlangsung maka masyarakat harus terlibat dan berpartisipasi secara aktif agar dapat berhasil. Agar pemberdayaan bisa terwujud dan efektif, tidak cukup hanya terlibat dan memiliki pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi; kita juga perlu melatih masyarakat agar fleksibel dalam menghadapi perubahan, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mampu menjaga kemajuan mereka. apa yang telah mereka capai. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social”(Margayaningsih, 2018).

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus perhatian dalam pembangunan lokal fenomena ini menjadi semakin penting di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan sosial, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi isu terkait pemberdayaan masyarakat. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan peluang ekonomi melalui peningkatan pemahaman, cara pandang, perilaku, dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyesuaikan bantuan, program, dan kebijakan dengan permasalahan dan kebutuhan spesifik di setiap kota. Tujuan pemerintah dalam pembangunan desa adalah membantu masyarakat pedesaan menjadi mandiri secara ekonomi. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan melaksanakan program yang memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini akan membantu bisnis yang ada di daerah pedesaan menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih baik (Sambolempan, S., Hannan, M., & Gay, 2020). Sederhananya, pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Masyarakat miskin, yang tidak memiliki kekuatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, adalah penerima yang ditunjuk (Hikmah Muhaimin, 2018).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan: Pertama, menciptakan lingkungan atau kondisi yang mendukung perkembangan masyarakat; Kedua, memperkuat kelembagaan daerah dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh melalui pelatihan, berbagai jenis bantuan, dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas fisik dan sosial; Ketiga, mencegah persaingan tidak sehat dan menjalin aliansi yang saling menguntungkan, membantu atau membela organisasi yang lebih lemah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan solusi yang tepat dalam situasi ini. Keyakinan ini harus diperkuat dengan upaya nyata (Maami, 2011).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas aspek pemberdayaan dan UMKM namun masih terdapat kebutuhan menggali lebih dalam tentang bagaimana pemerintah desa secara konkret merumuskan dan mengimplementasikan pemberdayaan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti Tohir, Hanny Purnamasari, dan Indra Aditya (2023) menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pariwisata. Namun penelitian ini hanya memberikan gambaran umum dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami rincian strategi pemerintah desa yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Penurunan angka pengangguran akan terjadi karena kemampuan sektor UMKM dalam mempekerjakan orang-orang yang bersedia bekerja namun kini menganggur. Usaha mikro berkembang dengan pesat, yang berarti lebih banyak peluang kerja dan upah yang lebih tinggi bagi semua orang. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan memastikan manfaat pembangunan didistribusikan secara adil ke seluruh masyarakat (Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, 2022).

Tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat melalui UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah telah melaksanakan beberapa proyek pemberdayaan meskipun ada kesulitan ekonomi dan kemajuan global. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah contoh baik dari

jenis perusahaan yang menjadi sasaran inisiatif pemberdayaan pemerintah; keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. UMKM Klepon muncul sebagai bentuk UMKM yang tidak hanya mempertahankan kearifan lokal dan budaya, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pemerintah Desa Bulang semakin menyadari peran strategis UMKM jajanan Klepon dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja lokal (Humam, 2012).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengkaji Pemberdayaan Masyarakat guna mengetahui efektivitas program pemberdayaan pemerintah desa, dengan fokus pada Strategi Pemerintah Desa Bulang dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM Klepon, dan sejauh mana dampak yang dihasilkan. tentang transformasi lokal yang diinginkan. Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi di tingkat lokal. Bentuk tesis digunakan untuk menghasilkan penelitian dan analisis ini, yang diberi judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Melalui Umkm Klepon Di Desa Bulang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian didasarkan pada konteks yang diberikan di atas “Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Klepon Di Desa Bulang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini berupaya mengetahui kebijakan pemerintah dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Klepon.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang signifikan yaitu:

Manfaat Teoritis

- a) Kami bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan memberikan wawasan mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan strategi di desa lain yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Variabel keberhasilan yang akan ditelusuri dalam penelitian ini meliputi keterlibatan masyarakat, efektivitas program, dan pelaksanaan kebijakan atau strategi yang memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.

Manfaat Praktis

- b) Organisasi pemberdayaan masyarakat juga diyakini dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. Penelitian tambahan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil menyeluruh penelitian ini dan analisis taktik pemerintah desa dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini mungkin menimbulkan pertanyaan penelitian baru, yang mungkin mengarah pada pembentukan teori yang kuat untuk penyelidikan yang lebih luas di masa depan.